

Krisis IHSG dan Tantangan Ekonomi Indonesia: Menjaga Kepercayaan Pasar dan Stabilitas Fiskal

Alifah Andriani

KSEI LiEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Give Your Opinion (Mei)</p>	<p>IHSG mengalami penurunan signifikan pada 18 Maret 2025 sebesar 5,02% memicu ketidakstabilan pasar dan dampak ekonomi luas, disebabkan oleh kondisi fiskal yang memburuk, ketidakpastian global, dan pernyataan kontroversial pejabat tinggi negara. Dampaknya terasa di sektor keuangan dengan kerugian investor dan melambatnya konsumsi, sektor perbankan dengan peningkatan risiko kredit bermasalah, serta sektor riil yang kesulitan pendanaan, yang semuanya menghambat pertumbuhan ekonomi. Anjloknya IHSG juga menurunkan kepercayaan investor, memicu <i>capital outflow</i> dan tekanan pada rupiah, serta mengurangi penerimaan pajak korporasi, yang berpotensi meningkatkan utang pemerintah. Oleh karena itu, komunikasi publik yang efektif, kepastian kebijakan, dan koordinasi antarlembaga ekonomi sangat penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan kepercayaan investor.</p>
<p>Keywords: <i>IHSG, Krisis Ekonomi, Defisit APBN, Stabilitas Fiskal</i></p>	
<p>Editor: Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

Pendahuluan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kondisi pasar saham di Indonesia. Dalam periode 19 September 2024 hingga 18 Maret 2025, pasar modal Indonesia mengalami gejolak yang signifikan. Puncaknya terjadi pada 18 Maret 2025, ketika IHSG mengalami penurunan tajam hingga 5,02% dalam satu sesi perdagangan, sehingga memicu penghentian sementara perdagangan (*trading halt*) selama 30 menit oleh Bursa Efek Indonesia. Kebijakan tersebut diambil sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 per 10 Maret 2020 tentang Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan ketidakstabilan pasar modal, tetapi juga berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional, termasuk terhadap kebijakan fiskal, seperti pengeluaran dan belanja negara. Jika tren pelemahan ini berlangsung dalam jangka panjang, konsekuensinya dapat memengaruhi pendapatan negara, stabilitas fiskal, hingga pengeluaran pemerintah. Tekanan terhadap IHSG ini juga membangkitkan kembali jejak sejarah akan guncangan besar dalam perekonomian Indonesia, seperti krisis moneter 1998 dan pandemi Covid-19.

Selain itu, dinamika di pasar modal juga diperburuk oleh beberapa komentar kontroversial dari Presiden Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai mereduksi pentingnya peran pasar modal. Misalnya, dalam acara Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang pada 4 Desember 2024, beliau menganalogikan investasi saham bagi rakyat kecil dengan praktik judi. Terbaru, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025, Prabowo menyatakan bahwa penurunan harga saham bukan masalah besar selama stok pangan Indonesia aman. Menurut Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap dinamika pasar modal yang sebenarnya merupakan infrastruktur penting dalam pendanaan sektor riil, baik melalui saham maupun obligasi.

Melihat perkembangan tersebut, penting untuk memahami bagaimana gejolak IHSG, ditambah dinamika kebijakan politik dan fiskal, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam essay ini akan dibahas secara mendalam dampak anjloknya IHSG terhadap perekonomian nasional serta pentingnya menjaga kepercayaan pasar (investor) dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Selain itu, dinamika di pasar modal juga diperburuk oleh beberapa komentar kontroversial dari Presiden Prabowo. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang dinilai mereduksi pentingnya peran pasar modal. Misalnya, dalam acara Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang pada 4 Desember 2024, beliau menganalogikan investasi saham bagi rakyat kecil dengan praktik judi. Terbaru, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Maret 2025, Prabowo menyatakan bahwa penurunan harga saham bukan masalah besar selama stok pangan Indonesia aman. Menurut Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, pernyataan tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap dinamika pasar modal yang sebenarnya merupakan infrastruktur penting dalam pendanaan sektor riil, baik melalui saham maupun obligasi. Melihat perkembangan tersebut, penting untuk memahami bagaimana gejolak IHSG, ditambah dinamika kebijakan politik dan fiskal, berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam essay ini akan dibahas secara mendalam dampak anjloknya IHSG terhadap perekonomian nasional serta pentingnya menjaga kepercayaan pasar (investor) dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Pembahasan

Penurunan tajam IHSG pada Maret 2025 tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya jatuhnya pasar saham ini. Pertama, kondisi fiskal negara yang memburuk menjadi salah satu pemicu utama. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tinggi menciptakan kekhawatiran di kalangan investor tentang keberlanjutan kebijakan fiskal pemerintah. Hal tersebut terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025, yang di mana data Kemenkeu menunjukkan penerimaan pajak hingga Februari 2025 terkontraksi sebesar 30% (*Dilansir dari CNBC Indonesia*). Ketidakpastian ekonomi global, termasuk tren suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik di beberapa kawasan, turut memperburuk sentimen pasar. Selain itu, pernyataan kontroversial dari pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo, yang dinilai kurang mendukung stabilitas pasar, membuat kepercayaan investor semakin tergerus. Investor pada dasarnya sangat sensitif terhadap ketidakpastian, baik yang berasal dari faktor domestik maupun global.

Anjloknya IHSG membawa dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Di sektor keuangan, nilai kapitalisasi pasar yang menyusut drastis menyebabkan investor mengalami kerugian besar. Akibatnya, banyak investor ritel menahan diri dari aktivitas belanja dan investasi, yang kemudian berimbas pada melambatnya konsumsi domestik dan memberikan tekanan kepada masyarakat dengan ekonomi kelas menengah yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Sektor perbankan juga terkena imbas, karena turunnya nilai aset keuangan dapat memperbesar risiko kredit bermasalah. Di sektor riil, perusahaan-perusahaan besar yang bergantung pada pendanaan dari pasar modal mengalami kesulitan untuk mendapatkan dana secara langsung, sehingga banyak dari mereka menunda ekspansi atau mengurangi produksi. Kondisi ini memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

IHSG bukan sekadar angka di papan bursa, melainkan cerminan dari tingkat kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Ketika IHSG jatuh, kepercayaan investor domestik dan asing ikut menurun. Akibatnya, modal asing dapat keluar dari Indonesia (*capital outflow*), menyebabkan tekanan tambahan pada nilai tukar rupiah. Investor asing menunjukkan pandangan negatif terhadap pasar Indonesia, dengan Morgan Stanley dan Goldman Sachs (bank investasi terkemuka di New York) yang memangkas rating saham-saham Indonesia. Mereka menyoroti defisit anggaran yang melebar menjadi 2,9 persen dari PDB dan risiko fiskal akibat kebijakan pemerintah. Goldman Sachs bahkan memperkirakan rupiah akan menjadi mata uang terburuk di Asia dalam waktu dekat. Tekanan ini memperbesar beban impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan. Dari sisi fiskal, penerimaan negara dari pajak sektor korporasi bisa menurun drastis karena perusahaan mengalami penurunan laba (keuntungan).

Kondisi ini membuat pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyusun anggaran, dan mungkin terpaksa menambah utang (pinjaman) untuk menutupi kekurangan pembiayaan, yang pada akhirnya memperberat beban fiskal di masa depan. Di sisi lain, meskipun pengetahuan mereka tentang sertifikasi halal masih rendah, mayoritas pelaku UMKM menyadari pentingnya sertifikasi tersebut dalam menjaga kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal berfungsi sebagai bentuk jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang diakui. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa kehadiran sertifikasi halal dapat meningkatkan preferensi konsumen, terutama di lingkungan yang mayoritas muslim. Dalam konteks UMKM di sekitar kampus FEB UIN Jakarta, yang merupakan universitas Islam, hal ini menjadi lebih relevan karena konsumen potensial umumnya sangat mengutamakan aspek kehalalan produk.

Adapun mengenai keinginan untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku UMKM menunjukkan antusiasme jika ada pendampingan yang memadai. Ini menandakan bahwa kendala yang dihadapi bukanlah pada niat, melainkan pada kurangnya dukungan dan pendampingan dari pihak terkait. Sebuah studi menemukan bahwa pendampingan oleh lembaga sertifikasi halal berperan penting dalam mempercepat proses sertifikasi, terutama bagi UMKM yang menghadapi kendala administratif dan finansial. Dukungan semacam ini akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal dan mengembangkan usaha mereka secara lebih berkelanjutan.

Penutup

Secara keseluruhan, penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi pada pertengahan Maret 2025 membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Anjloknya IHSG ini tidak hanya mencerminkan ketidakstabilan pasar modal, tetapi juga menyoroti berbagai masalah struktural yang ada dalam perekonomian Indonesia, baik yang bersifat domestik maupun eksternal. Faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan IHSG ini meliputi kondisi fiskal negara yang semakin memburuk, ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di negara maju, serta faktor-faktor internal yang bersumber dari kebijakan pemerintah dan pernyataan kontroversial yang dapat mengurangi kepercayaan pasar. Ketidakpastian yang muncul akibat faktor-faktor tersebut menyebabkan penurunan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, yang pada gilirannya memengaruhi kondisi pasar modal dan mengarah pada pelarian modal asing yang berpotensi memperburuk situasi ekonomi Indonesia lebih lanjut.

Selain itu, dampak dari anjloknya IHSG ini dirasakan luas, mencakup sektor keuangan, sektor riil, hingga sektor fiskal negara. Di sektor keuangan, penurunan kapitalisasi pasar yang drastis menyebabkan kerugian besar bagi para investor, yang berimbas pada pelambatan konsumsi domestik dan terjadinya penurunan aktivitas investasi. Pada sektor perbankan, penurunan nilai aset yang terjadi juga memperbesar risiko kredit bermasalah. Sementara itu, di sektor riil, banyak perusahaan yang bergantung pada pasar modal sebagai sumber pendanaan yang terpaksa menunda ekspansi atau mengurangi produksinya, yang pada akhirnya berdampak pada melambatnya laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi fiskal, penurunan penerimaan pajak dari sektor korporasi sebagai dampak dari turunnya laba perusahaan membuat pemerintah harus menghadapi tekanan yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran, bahkan kemungkinan harus menambah utang (pinjaman) untuk menutupi defisit yang terjadi.

Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang luas tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik serta menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan konsisten. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak menambah ketidakpastian yang sudah ada, yang dapat memperburuk situasi ekonomi. Selain itu, koordinasi yang kuat antar lembaga ekonomi seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan rasa aman kepada investor, baik domestik maupun asing. Untuk itu, pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati, dengan kebijakan ekonomi yang pro-investasi, serta kepastian yang lebih jelas mengenai arah ekonomi Indonesia di masa depan, sangat diperlukan agar perekonomian Indonesia dapat kembali stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.

Referensi

- CNBC Indonesia. (2025). "Penerimaan Pajak Babak Belur di Awal Tahun, Ini Datanya!". *cncbindonesia.com*. <https://www.cncbindonesia.com/research/20250313112156-128-618244/penerimaan-pajak-babak-belur-di-awal-tahun-ini-datanya>
- Fakta. (2025). "Sejumlah Pernyataan Negatif Prabowo Soal Saham Bisa Bikin Investor Kabur". *Fakta.com*. <https://fakta.com/ekonomi/fkt-24480/sejumlah-pernyataan-negatif-prabowo-soal-saham-bisa-bikin-investor-kabur>
- Shofihawa. (2025). "IHSG Anjlok, Pakar FEB UGM Minta Masyarakat Untuk Hati- Hati Mengambil Keputusan Investasi". Universitas Gadjah Mada. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/13133-ihsg-anjlok-pakar-feb-ugm-minta-masyarakat-untuk-hati-hati-mengambil-keputusan-investasi>
- Tempo. (2025). "IHSG Ambruk Berdampak pada Ekonomi, Bagaimana Perbandingannya dengan Krisis 1998 dan Covid-19?". *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ihsg-ambruk-berdampak-pada-ekonomi-bagaimana-perbandingannya-dengan-krisis-1998-dan-covid-19--1221287>
- Tempo. (2025). "IHSG Anjlok, Apa Kata BEI dan Dampaknya bagi Investor?". *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/ihsg-anjlok-apa-kata-bei-dan-dampaknya-bagi-investor--1221618>

Penurunan IHSG dan Ketidakpastian Investor pada Awal 2025

Muhammad Fadhil Wirahman

KSEI LiEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Give Your Opinion (Mei)</p>	<p>Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami koreksi signifikan lebih dari 755 poin atau sekitar 10,66% pada triwulan pertama 2025, disertai arus keluar dana asing sebesar Rp26,92 triliun, yang menunjukkan tekanan besar pada persepsi risiko pasar domestik. Ketidakstabilan ini dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti pernyataan kontroversial Presiden mengenai investasi saham, kebijakan fiskal yang dianggap agresif, dan kebijakan akuntansi keuangan pemerintah yang meresahkan. Untuk mengatasi hal ini dan mengembalikan kepercayaan investor, pemerintah disarankan untuk melakukan konsolidasi narasi ekonomi nasional, memulihkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perbankan, mereformulasi kebijakan fiskal agar lebih berbasis data dan berkelanjutan, serta memperkuat regulasi pasar dan sentimen investor.</p>
<p>Keywords: <i>Penurunan IHSG, Sentimen Investor, PMBG, Utang KUR</i></p>	
<p>Editor: Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

Pendahuluan

Pada triwulan pertama 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami koreksi signifikan sebesar lebih dari 755 poin atau sekitar 10,66%. Penurunan ini beriringan dengan arus keluar dana asing sebesar Rp26,92 triliun dari bursa efek Indonesia, menunjukkan tekanan besar terhadap persepsi risiko pasar domestik (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2025). Ketidakstabilan ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor non-ekonomi seperti pernyataan kontroversial Presiden, kebijakan fiskal yang dianggap agresif, serta kebijakan akuntansi keuangan pemerintah yang meresahkan.

Pembahasan

Kritik terhadap Faktor-Faktor Penyebab

1. Pernyataan Presiden Terkait Investasi Saham

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa "saham itu seperti perjudian bagi rakyat kecil" memunculkan persepsi bahwa otoritas tertinggi negara bersikap ambigu terhadap mekanisme pasar modal. Meskipun dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat agar tidak berspekulasi secara sembrono, pernyataan ini mengirimkan sinyal negatif kepada investor institusional dan asing mengenai komitmen negara terhadap pembangunan pasar keuangan yang sehat (Liputan6.com, 2025). Sebuah negara yang menstigmatisasi bursa efek sebagai aktivitas spekulatif dapat kehilangan kredibilitas di mata investor global.

2. Kebijakan Fiskal yang Terlalu Ekspansif

Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) dengan alokasi anggaran mencapai Rp71 triliun pada tahun 2025 dinilai sebagai bentuk kebijakan fiskal ekspansif yang belum disertai dengan sumber pendanaan yang kredibel dan transparan (Tempo.co, 2025). Selain itu, inisiatif pendirian Koperasi Merah Putih sebagai wadah ekonomi kerakyatan juga masih menghadapi pertanyaan soal efektivitas kelembagaan dan sistem pengawasan. Ketika kebijakan belanja pemerintah tidak disertai roadmap fiskal yang solid, pasar merespons dengan kekhawatiran terhadap risiko pelebaran defisit dan tekanan inflasi.

3. Penghapusan Pencatatan Utang KUR di Neraca Bank BUMN

Keputusan pemerintah untuk menghapus pencatatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari neraca bank BUMN menciptakan celah transparansi dan menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kualitas aset lembaga keuangan negara. Praktik akuntansi ini berpotensi memperburuk *moral hazard* dan menyulitkan investor dalam mengevaluasi kesehatan sektor perbankan nasional (RMOL.ID, 2025). Selain itu, tindakan ini mengaburkan nilai aktual portofolio pembiayaan, yang pada akhirnya menurunkan kualitas tata kelola korporasi (*good corporate governance*).

Saran dan Solusi

1. Konsolidasi Narasi Ekonomi Nasional

Ketidakkonsistenan pernyataan pejabat publik, terutama dari Presiden, telah memperkuat sentimen negatif investor. Di tengah pasar yang sangat sensitif terhadap persepsi, komunikasi yang ambigu mengenai saham dan investasi dapat mempercepat aksi jual dan eksodus modal asing. Solusi yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan ini antara lain:

- Pemerintah dapat membentuk *Economic Communication Task Force* di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang bertugas mengoordinasikan narasi resmi terkait kebijakan fiskal, moneter, dan pasar keuangan. Setiap pernyataan strategis Presiden dan menteri harus melewati kurasi substansi agar tidak kontra- produktif terhadap stabilitas pasar.
- Pemerintah, OJK, dan BEI perlu mengadakan kampanye edukasi nasional untuk meningkatkan literasi pasar modal, menjelaskan perbedaan antara investasi, spekulasi, dan perjudian. Ini dapat mengurangi dampak psikologis dari pernyataan kontroversial dan meningkatkan partisipasi publik secara bijak.
- Setiap proyeksi dan kebijakan ekonomi perlu dibarengi dengan narasi yang memperkuat kepercayaan investor terhadap independensi lembaga keuangan dan kredibilitas fiskal.

2. Restorasi Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Perbankan

Penghapusan pencatatan KUR dari neraca bank BUMN memicu keraguan pasar mengenai transparansi dan akuntabilitas. Praktik ini tidak hanya menimbulkan risiko informasi asimetris, tetapi juga menurunkan kredibilitas laporan keuangan sektor perbankan. Solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu antara lain:

- Evaluasi mandiri OJK dan auditor independen, otoritas jasa keuangan bersama BPK dan auditor independen harus melakukan audit forensik terhadap kebijakan penghapusan pencatatan KUR untuk mengkaji kesesuaiannya dengan PSAK dan IFRS. Jika ditemukan pelanggaran prinsip-prinsip akuntansi, pemerintah harus memulihkan pencatatan secara terbuka.
- Peningkatan standar pelaporan keuangan BUMN, pemerintah perlu mewajibkan seluruh bank BUMN untuk menyajikan laporan keuangan yang fully consolidated dan fully transparent, termasuk segala bentuk kewajiban off-balance sheet. Hal ini dapat diperkuat melalui revisi PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengawasan BUMN.
- Penerapan sistem *Early Warning* dan *Disclosure Risk Mapping*, lembaga pengawas dan bank BUMN perlu mengembangkan sistem peringatan dini berbasis risiko keuangan, yang secara terbuka diumumkan kepada publik dalam bentuk quarterly risk disclosure bulletin.

3. Reformulasi Kebijakan Fiskal agar Lebih Berbasis Data dan Berkelanjutan

Program-program besar seperti PMBG dan koperasi nasional belum dilandasi rencana pendanaan yang komprehensif. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa APBN dikelola secara ekspansif tanpa pengendalian defisit yang cukup kuat. Hal ini dapat menjadi masalah untuk pertumbuhan ekonomi nasional jika tidak dieksekusi dengan benar. Solusi yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanganan masalah tersebut antara lain:

- Pemetaan anggaran berdasarkan *fiscal space* nyata, pemerintah harus menyusun *fiscal space mapping* jangka menengah untuk menakar kemampuan anggaran dalam membiayai program sosial tanpa memperlebar defisit secara berlebihan. Ini dapat dilakukan melalui integrasi data perpajakan, efisiensi belanja, dan pengurangan pemborosan anggaran.
 - Penerbitan green sukuk atau *social bond* terikat proyek, untuk membiayai program seperti PMBG, pemerintah dapat menerbitkan obligasi sosial atau green sukuk dengan ikatan penggunaan dana secara spesifik dan terverifikasi. Model ini telah digunakan dengan sukses oleh negara-negara seperti Jerman dan Chile dalam mendanai program sosial yang terukur dampaknya.
 - Evaluasi efektivitas anggaran berbasis bukti (*Evidence-Based Budgeting*), setiap program pemerintah seperti PMBG dan Koperasi Merah Putih harus melewati proses uji kelayakan berbasis data, termasuk analisis cost-effectiveness, simulasi dampak fiskal, serta audit kebijakan pasca implementasi. Evaluasi ini bisa melibatkan Bappenas dan lembaga think tank independen.
 - Penguatan koordinasi fiskal-moneter, pemerintah wajib berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia dalam merancang kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan tekanan inflasi, ketidakstabilan nilai tukar, atau kenaikan suku bunga jangka panjang. Misalnya, pengendalian utang jangka pendek perlu diseimbangkan dengan likuiditas perbankan agar tidak mengganggu transmisi kebijakan moneter.
4. Reformulasi Kebijakan Fiskal agar Lebih Berbasis Data dan Berkelanjutan
- Ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang cenderung mendadak (misalnya, isu KUR dan pernyataan Presiden) menimbulkan kegelisahan pasar dan menghambat arus masuk modal asing. Ini akan berdampak buruk bagi pasar modal Indonesia karna tidak mendapat kepercayaan para investor asing untuk menanam modal di pasar modal Indonesia. Pemerintah perlu mengambil tindakan untuk menangani permasalahan tersebut, solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain:
- Revisi undang-undang pasar modal dengan fokus pada perlindungan investor dan stabilitas kebijakan, perlu ada instrumen hukum yang melindungi investor dari ketidakpastian politik dan kebijakan yang inkonsisten, serta memperkuat rule of law dalam penyelenggaraan pasar modal.
 - Pembentukan dewan stabilitas pasar keuangan nasional, lembaga lintas sektor ini, terdiri dari Kemenkeu, OJK, BI, BEI, dan perwakilan industri, bertugas memonitor potensi guncangan pasar secara real-time dan memberi rekomendasi kebijakan preventif yang terkoordinasi.
 - Pengembangan indeks ketahanan pasar domestik, pemerintah dan BEI dapat meluncurkan indeks yang mengukur ketahanan pasar saham domestik terhadap gejala eksternal dan internal, sebagai acuan investor institusi dalam pengambilan keputusan.

Penutup

Penurunan tajam IHSG pada awal 2025 merupakan gejala dari akumulasi ketidakpastian kebijakan yang mengganggu ekspektasi investor terhadap stabilitas makroekonomi dan kualitas tata kelola negara. Untuk menghindari spiral negatif lebih lanjut, pemerintah perlu merekonstruksi ulang komunikasi kebijakan, memulihkan integritas sistem pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa belanja fiskal dilakukan secara disiplin dan terukur. Kunci keberhasilan pemuliharaan kepercayaan pasar terletak pada konsistensi arah kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekspektasi publik dan pelaku pasar.

Pasar Modal (IHSG): Penurunan Tajam dan Ketidakpastian Investor

Kaylla Himmatul Aliyah

KSEI LiSEnSi UIN Jakarta

Article Info	ABSTRACT
<p>Article history: Give Your Opinion (Mei)</p>	<p>Pada awal tahun 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami penurunan tajam lebih dari 10% atau 755 poin, disertai aksi jual investor asing dengan <i>net sell</i> mencapai Rp26,92 triliun, yang mencerminkan goyahnya kepercayaan pasar modal dan hilangnya keyakinan terhadap stabilitas ekonomi serta arah kebijakan negara. Faktor-faktor penyebabnya meliputi pernyataan kontroversial Presiden Prabowo yang menyamakan investasi saham dengan perjudian, kebijakan penghapusan pencatatan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari neraca bank BUMN, dan program-program fiskal ekspansif seperti Makan Bergizi Gratis tanpa kejelasan sumber pendanaan yang solid, yang semuanya menimbulkan kekhawatiran terhadap defisit APBN dan rasio utang pemerintah. Untuk memulihkan kepercayaan, disarankan agar pemerintah memperbaiki komunikasi publik dengan pernyataan yang membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi kebijakan keuangan, terutama terkait KUR, dan memberikan kejelasan mengenai sumber pendanaan serta pengelolaan program sosial.</p>
<p>Keywords: <i>Net Sell Asing, Ketidakpastian Investor, Rasio Utang Pemerintah</i></p>	
<p>Editor: Zahra Widad Salma Faculty of Economics and Business</p>	

Pendahuluan

Di awal tahun 2025, kondisi pasar modal Indonesia benar-benar menghadapi ujian berat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat anjlok lebih dari 10% atau 755 poin, hanya dalam beberapa bulan. Investor asing pun melakukan aksi jual besar-besaran dengan nilai net sell mencapai Rp 26,92 triliun. Penurunan tajam ini bukan hanya sekedar angka, melainkan menunjukkan jika kepercayaan pasar modal kita sedang goyah, serta mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan arah kebijakan negara. Terdapat banyak faktor yang membuat situasi ini semakin parah. Salah satunya adalah pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan investasi saham itu sama seperti berjudi. Meski mungkin maksudnya untuk mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati, namun sayangnya penyampaian seperti ini justru menjadi bumerang dan memicu kepanikan.

Pembahasan

Bagi para investor, apalagi investor asing yang tidak terlalu memahami konteks budaya kita, pernyataan seperti ini dapat diartikan bahwa negara Indonesia sendiri meragukan sistem keuangannya. Akibatnya, aksi jual semakin besar dan IHSG semakin jatuh. Hal tersebut merupakan contoh penting betapa sensitifnya psikologi pasar terhadap ucapan pemimpin suatu negara.

Sebagai perbandingan, misalnya saat Presiden Trump memberikan pernyataan kontroversial pada tahun 2019 mengenai kebijakan The Fed (Bank Sentral AS), yang kemudian menyebabkan penurunan tajam pada pasar saham AS, dengan Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun sekitar 2,5% dalam satu hari pada bulan Oktober 2019. Artinya, dalam pasar modal, cara berbicara pun bisa lebih berbahaya daripada angka itu sendiri. Masalah lain datang dari sektor perbankan. Pemerintah baru-baru ini, menghapus kebijakan mencatat utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari neraca bank-bank BUMN. Secara teknis, ini mungkin bertujuan untuk memperbaiki rasio keuangan bank. Tetapi di sisi lain, kebijakan ini justru menimbulkan pernyataan serius: kalau utang KUR tidak lagi tercatat, bagaimana kita bisa tahu mengenai kondisi bank secara riil? Serta bagaimana kita bisa yakin kalau kondisi bank itu aman dan baik-baik saja? Apalagi, menurut data realisasi hingga kuartal I 2025, penyaluran KUR oleh BRI saja telah mencapai Rp 42,23 triliun, dari target nasional sebesar Rp 300 triliun di tahun 2025. Nilai ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR masih berlangsung dalam skala besar. Jika kualitas kredit yang disalurkan tidak terjaga dengan baik, ditambah dengan kebijakan penghapusan pencatatan KUR dari neraca bank BUMN, maka kondisi ini dapat memunculkan risiko tersembunyi terhadap stabilitas sektor perbankan nasional. Dalam konteks ini, transparansi data menjadi sangat krusial agar kepercayaan publik terhadap sistem keuangan tetap terjaga.

Belum lagi, di tengah situasi seperti ini, pemerintah juga mendorong program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis dan pendirian Koperasi Merah Putih. Di satu sisi, niat meningkatkan kesejahteraan rakyat patut diapresiasi. Namun di sisi lain, saya mempertanyakan realisme kebijakan fiskal di balik program-program tersebut. Meskipun pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar 2,53% terhadap PDB, beberapa proyeksi, termasuk dari Bank Dunia, memperkirakan defisit dapat melebar hingga 2,7% dari PDB. Selain itu, rasio utang pemerintah diperkirakan meningkat menjadi 40,1% dari PDB pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan target dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) sebesar 39,15%.

Dari angka-angka ini, seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam merancang dan melaksanakan program-program kebijakan, agar tidak membebani fiskal secara berlebihan dan menjaga kepercayaan investor serta stabilitas ekonomi nasional. Memberi makan bergizi itu memanglah merupakan program yang mulia karena membantu rakyat kecil, tetapi tanpa perencanaan keuangan yang kuat, justru dapat menciptakan krisis yang baru. Apalagi, program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Jika pengeluaran tidak dikontrol, bisa-bisa utang negara akan makin lebih membengkak. Inilah yang membuat para investor merasa khawatir dan pada akhirnya memilih menarik dana mereka.

Penyebab utama ketidakpastian ini adalah kombinasi dari komunikasi yang kurang hati-hati dan ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi jangka panjang. Investor, baik dalam maupun luar negeri, pada akhirnya butuh yang namanya kejelasan dan keyakinan. Kejelasan arah kebijakan, kejelasan data keuangan, dan kejelasan komitmen pemerintah terhadap pasar modal tetap sehat. Agar mereka merasa yakin dan percaya untuk tetap menginvestasikan dana mereka. Tanpa itu semua, wajar jika kepercayaan menguap, dan modal ikut pergi. Saran yang bisa diberikan kepada pemerintah dalam menangani persoalan ini. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publiknya. Seharusnya, pemerintah lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik, terutama mengenai ekonomi. Lebih baik semua disampaikan dengan bahasa yang membangun kepercayaan, bukan malah menimbulkan rasa takut. Kedua, jika terdapat kebijakan baru, seperti keputusan penghapusan pencatatan KUR, sebaiknya langsung disertai dengan laporan terbuka tentang bagaimana dampaknya ke sektor perbankan. Atau bila perlu dibarengi dengan penerbitan laporan terpisah tentang kualitas kredit KUR per kuartal. Transparansi itu kunci untuk membangun dan menjaga kepercayaan pasar. Ketiga, mengenai program-program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, pemerintah perlu lebih jelas lagi mengenai dari mana sumber pendanaan dan mekanisme pengelolaannya. Jangan sampai niat baik malah membuat keuangan negara semakin berat. Investor perlu diyakini bahwa program-program tersebut dirancang dengan perhitungan yang matang, bukan hanya sekedar janji politik.

Sebenarnya Indonesia memiliki banyak potensi untuk tumbuh lebih besar. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan serius, saya yakin, kita dapat mengembalikan kepercayaan pasar. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat. Tetapi kita juga perlu belajar bahwa dalam dunia pasar modal, persepsi bisa mengalahkan realitas. Dan membangun persepsi positif, tentu tidak bisa hanya dengan janji-janji semata, melainkan perlu dibarengi dengan konsistensi tindakan dan komunikasi yang baik. Jika dari sisi komunikasi dan kebijakan tidak hati-hati, kepercayaan itu dapat hilang dalam waktu cepat.

Pada akhirnya, melihat kondisi ini sebagai alarm, bahwa ekonomi itu bukan hanya soal angka, tetapi juga soal rasa percaya. Dan rasa percaya itu harus dibangun lewat ucapan, tindakan, dan kebijakan yang konsisten. Jika kita bisa belajar dari kejadian ini, saya optimis pasar modal Indonesia akan bangkit lagi dan jadi lebih kuat di masa depan.